

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat birokrasi politik Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pengelolaan sampah di Kota Bekasi yang diperkuat dengan analisis *collaborative governance* sebagai jendela analisis birokrasi politik yang terjadi di Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah. Dalam melakukan pengelolaan sampah tentunya terdapat peran-peran unsur yang terlibat yaitu DPRD Kota Bekasi, DLH Kota Bekasi, dan TMEP TPST Bantargebang dan TPA Sumur Batu sebagai lembaga-lembaga politik atau suprastruktur politik yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Permasalahan pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu Kota Bekasi yang masih menggunakan sistem *open dumping* ini menimbulkan banyak permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar sehingga perlu adanya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah. Hasilnya, bahwa birokrasi politik Pemerintah Kota Bekasi belum berjalan dalam melakukan pengelolaan sampah yang diperkuat dengan analisis *collaborative governance*. *Pertama*, tidak diikutsertakan peran DPRD Kota Bekasi dalam melakukan pengelolaan sampah terutama pada proses proyek PLTSa di TPA Sumur Batu. *Kedua*, adanya perbedaan kepentingan politik antara DPRD Kota Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi yang ditandai dengan proses Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi pada Tahun 2018 silam. *Ketiga*, dibatalkannya proyek PLTSa membuat DPRD, DLH, dan TMEP TPST Bantargebang dan TPA Sumur Batu melakukan kolaborasi pada penanggulangan dampak pengelolaan sampah sebagai bentuk pengimplementasian Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan TPST Bantargebang Kota Bekasi.

Kata Kunci: Kebijakan Pengelolaan Sampah, Birokrasi Politik, dan *Collaborative Governance*

ABSTRACT

This research aims to see the political bureaucracy of the Bekasi City Government in carrying out waste management in Bekasi City which is reinforced by collaborative governance analysis as a window of political bureaucratic analysis that occurs in Bekasi City Government in waste management. In carrying out waste management, of course, there are roles of the elements involved, namely the Bekasi City DPRD, Bekasi City DLH, and TMEP TPST Bantargebang and TPA Sumur Batu as political institutions or political superstructures that have the power and authority to meet the needs of the community. The problem of waste management in the Batu Sumur landfill in Bekasi City which still uses the open dumping system causes many problems felt by the surrounding community so there is a need for waste management carried out by the government. As a result, the political bureaucracy of the Bekasi City Government has not been running in carrying out waste management which is reinforced by collaborative governance analysis. First, the role of the Bekasi City DPRD is not included in carrying out waste management, especially in the PLTSa project process at the Sumur Batu Landfill. Second, there is a difference in political interests between the Bekasi City DPRD and the Bekasi City Government which is marked by the Bekasi City Regional Head Election process in 2018. Third, the cancellation of the PLTSa project made the DPRD, DLH, and TMEP TPST Bantargebang and TPA Sumur Batu collaborate on combatting the impact of waste management as a form of implementation of the Pollution and Environmental Damage Control Program by conducting Monitoring and Evaluation of TPST Bantargebang Management in Bekasi City.

Keywords: *Waste Management Policy, Political Bureaucracy, and Collaborative Governance*